

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa pangan, sandang, dan papan. Menurut BPS (2020) Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari sehingga penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis rata-rata. Pada kemiskinan memiliki beberapa jenis seperti berikut:

##### **a. Kemiskinan Subjektif**

Kemiskinan subjektif adalah keadaan keluarga yang dalam pemikirannya merasa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup padahal sebenarnya tidak terlalu miskin.

##### **b. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan absolut adalah keadaan keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan karena pendapatan keluarga tersebut dibawah garis kemiskinan.

##### **c. Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan relatif merupakan suatu keadaan dimana pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau lapisan masyarakat seperti masyarakat perkotaan dan masyarakat perdesaan sehingga mengakibatkan ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan standar kesejahteraan.

#### d. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah keadaan dimana terjadinya sumber daya alam (SDA) yang langka sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah.

#### e. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan suatu keadaan masyarakat miskin yang melakukan kebiasaan yang berasal dari budaya atau adat istiadat sehingga tidak mau memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern.

#### f. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang terjadi karena ketidakmampuan sistem atau struktur sosial menghubungkan seseorang dengan sumber daya yang ada.

Berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2011, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kemiskinan memiliki beberapa faktor penyebab sebagai berikut:

##### a. Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah akan mengakibatkan seseorang kurang mempunyai keterampilan sehingga sulit untuk masuk dunia kerja yang lebih baik.

##### b. Malas Bekerja

Terdapat sikap malas dan bergantung pada nasib mengakibatkan seseorang tidak bergairah untuk bekerja.

c. Keterbatasan Sumber Daya Alam

Kemiskinan akan terjadi jika sumber daya alam tidak memiliki keuntungan bagi kehidupan masyarakat.

d. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan pada masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan bagi masyarakat miskin sangat kecil kemungkinan untuk mereka membuka lapangan pekerjaan karena terbatasnya modal dan keterampilan.

e. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkatnya tuntutan atau beban hidup yang harus mereka tanggung.

### **2.1.2. Angka Putus Sekolah**

Menurut KBBI pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru TK, SD, SMP, dan SMA mengatakan bahwa usia kelompok peserta didik adalah pada umur 6 hingga 21 tahun. Tetapi pada usia kelompok peserta didik masih banyak masyarakat yang melakukan putus sekolah. Angka Putus Sekolah merupakan suatu kelompok

usia sekolah yang tidak bersekolah lagi ataupun tidak menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi angka putus sekolah maka kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata dan sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan semakin baik di suatu wilayah (BPS,2018).

Salah satu penyebab anak putus sekolah yaitu faktor ekonomi keluarga yang mengharuskan peserta didik untuk membantu mencari nafkah dan terjadinya peserta didik yang melakukan pernikahan dini akibat pergaulan bebas serta penyebab-penyebab lain seperti pengangguran, masalah dalam keluarga, dan pandangan keluarga akan penting atau tidaknya pendidikan. Dampak yang akan timbul ketika banyak peserta didik yang melakukan putus sekolah adalah banyaknya angka pengangguran karena perusahaan membutuhkan ijazah minimal SMA/SMK serta kesejahteraan masyarakat kurang merata.

Rahmi dan Melti (2018) menyatakan bahwa putus sekolah disebabkan oleh kemiskinan dan rendahnya pendidikan orangtua. Kemiskinan ini indikatornya adalah banyaknya tanggungan dalam sebuah keluarga, pendapatan, dan rendahnya tingkat pendidikan dasar yang bisa dirasakan oleh seseorang.

### **2.1.3. Pernikahan Dini**

Menurut BKKBN (2018), pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 20 tahun. Angka pernikahan dini adalah

angka yang menggambarkan jumlah proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi (persen). Dengan mengetahui angka pernikahan dini menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia dini serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor kemauan sendiri, faktor budaya, dan terjadinya *married by accident*.

Pernikahan dini juga dapat dikaitkan dengan pembangunan daerah karena pembangunan daerah tidak hanya didasari oleh bidang ekonomi tetapi juga oleh bidang sosial sehingga upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai dasar pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 serta pengamalan pancasila. Faktor pendorong dalam pembangunan yaitu tersedia SDA yang berlimpah dan SDM yang meliputi dalam bidang pembangunan, kapasitas hukum, dan partisipasi masyarakat yang tinggi serta hambatan pembangunan daerah antara lain kondisi alam, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya pengolahan SDA, kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga pernikahan dini menjadi barometer dari kemajuan pembangunan suatu daerah. Ketika angka pernikahan dini di suatu daerah kecil maka dapat diyakini bahwa pembangunan daerah berlangsung secara lancar dan menyeluruh.

Pernikahan dini dilakukan oleh remaja yang masih belum stabil secara fisik, psikis, maupun materi maka akan rentan dengan berbagai permasalahan. Berikut dampak pernikahan dini:

a. Dampak bagi perempuan

Anak perempuan yang menjadi orang yang paling dirugikan dalam pernikahan dini karena haknya sebagai seorang anak terampas, hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak perlindungan dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua. Selanjutnya, seorang anak perempuan yang menikah akan mengalami sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Terakhir, pengetahuan seksualitas yang masih rendah meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi menular seperti HIV.

b. Dampak bagi anak-anak hasil pernikahan

Belum matangnya usia sang ibu, memberikan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak beresiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting.

c. Dampak di masyarakat

Pernikahan dini juga dapat berdampak pada masyarakat luas, salah satunya garis kemiskinan yang berkelanjutan. Hal tersebut terjadi akibat pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Akibat pernikahan dini juga menjadikan Indonesia tercatat sebagai tingginya angka stunting, anak

putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan. Masalah tersebut jelas sangat berbahaya jika dibiarkan melebar karena akan sangat berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah.

Tingginya insiden perkawinan anak di Indonesia pada akhirnya justru lebih banyak memunculkan implikasi yang negatif seperti kemiskinan. Bagi rumah tangga yang miskin akan menganggap bahwa anak perempuan sebagai beban ekonomi dan perkawinan dianggap sebagai solusi karena lazimnya setelah menikah. Padahal kondisi ekonomi anak dalam keluarga barunya banyak yang tidak menjadi lebih baik daripada saat sebelum menikah. Sumber penghasilan rendah dan bertambahnya jumlah anggota keluarga pada akhirnya memberi tekanan ekonomi yang semakin besar pada rumah tangga (Ningsih dan Didin, 2020).

#### **2.1.4. Pendapatan (PDRB)**

Pendapatan adalah PDRB perkapita provinsi di Indonesia dalam periode 2017-2020 merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi

oleh faktor harga. Dengan demikian, indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Menurut BPS (2021), dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a) Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

b) Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

c) Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

PDRB juga dapat mempengaruhi kemiskinan karena jika PDRB di suatu wilayah tinggi menandakan perekonomian di wilayah tersebut baik dan

sebaliknya jika PDRB di suatu wilayah rendah maka perekonomian di wilayah tersebut tidaklah baik. Perekonomian yang dimaksud merupakan perekonomian yang dapat menunjang kehidupan masyarakat sehingga tidak terjadi kemiskinan. Ketika tingginya angka PDRB di suatu wilayah dapat mengoptimalkan potensi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai serta dapat menekankan tingkat kemiskinan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya angka PDRB di suatu wilayah dapat meningkatkan jumlah kemiskinan dalam masyarakat karena pembangunan yang dilakukan dalam menyejahterakan masyarakat tidak optimal (Damanik dan Selna, 2020).

## **2.2. Studi Terkait**

Penelitian yang dilakukan Wriana dan Kartika (2018) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2012-2018”, bertujuan (1) untuk menganalisis pengaruh langsung pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2012-2018, (2) untuk menganalisis pengaruh langsung pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan disparitas pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2012-2018, (3) untuk menganalisis disparitas pendapatan berpengaruh tidak langsung terhadap pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2012-2018. Pengumpulan data dalam bentuk observasi yang mana peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek serta wawancara masyarakat secara mendalam, pengolahan data menggunakan *SPSS*.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh serta pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2012-2018 tetapi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2012-2018.

Indrayanti (2020) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau”, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dan data sekunder pada tahun 2008-2017 di Kabupaten dan Kota Provinsi Riau serta pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan pengeluaran per kapita berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai tingkat pengangguran dan pertumbuhan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Rasbin (2012) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Tujuh Provinsi Pemekaran di Indonesia”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemekaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat apakah mengalami peningkatan maupun penurunan atau bahkan tidak ada perubahan pada saat bergabung dengan provinsi induk. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel pada tahun 2007-2010 serta meliputi tujuh provinsi pemekaran, kemudian data

bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan di provinsi pemekaran secara signifikan berpengaruh oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat partisipasi pendidikan. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat provinsi pemekaran secara signifikan.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ningrum *et al.* (2020) dengan judul “Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam”, bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi data panel dengan pendekatan *pool model* dengan menggunakan *software Eviews 9* menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data yang telah dipublikasikan di beberapa sumber yaitu *website* Badan Pusat Statistik dan *website* Kementerian Keuangan periode tahun 2014-2018. Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas lebih kecil dari alpha (0,05) sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM ditunjukkan dengan nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha (0,05). Secara simultan, semua variabel penelitian berpengaruh

signifikan terhadap IPM dan berpengaruh yang ditunjukkan melalui R<sup>2</sup> sebesar 80,78% yang menunjukkan bahwa variabel kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dapat menjelaskan variabel Y, sisanya 19,22% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyawati dan Pierewan (2017) dengan judul “Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia”, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan pernikahan usia dini di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data sekunder, data ini diambil dari *Indonesian Family Life Survei* (IFLS) pada tahun 2015. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda dengan R-studio. Variabel penelitian ini menggunakan variabel *dummy*. Responden yang digunakan berdasarkan usia saat pertama kali menikah di bawah usia 21 tahun yang dikategorikan sebagai pernikahan usia dini. Responden penelitian ini ada 857 orang yang tersebar pada 13 Provinsi yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah variabel *dummy* pendidikan responden tingkat SD, Variabel *dummy* pendidikan pasangan yang tidak sekolah, Variabel *dummy* pendidikan pasangan tingkat SD, pendapatan rendah, dan pendapatan menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pernikahan usia dini di Indonesia, sedangkan variabel religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pernikahan usia dini di Indonesia yang artinya semakin religius akan berpengaruh untuk menurunkan pernikahan dini di Indonesia. Sedangkan *dummy* pendidikan responden tingkat SMA, *dummy* pendidikan pasangan tingkat SMA, *dummy* tingkat pendapatan tinggi, area tempat

tinggal, dan agama tidak memiliki hubungan terhadap pernikahan usia dini di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati *et al.* (2017) yang berjudul “Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang” dengan tujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita. Penelitian ini termasuk penelitian *survey* bentuk *explanatory*, dengan rancangan *cross-sectional study*. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 125 orang. Analisis data menggunakan uji *chi-square* penggabungan sel. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) nilai *chi-square* ( $x^2$  hitung) tingkat pendidikan  $27,22 >$  nilai  $x^2$  tabel 9,488, (2) nilai *chi-square* ( $x^2$  hitung) tingkat pendapatan  $10,47 >$  nilai  $x^2$  tabel 9,488, (3) nilai *chi-square* ( $x^2$  hitung) status pekerjaan  $2,16 <$  nilai  $x^2$  tabel 5,991. Diperoleh kesimpulan, ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan serta tidak ada hubungan yang signifikan antara status pekerjaan dengan usia perkawinan pertama wanita.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yusmianti dan Sanjani (2021) berjudul “Pengaruh Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Terhadap Keputusan Pernikahan Dini”, memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kesejahteraan ekonomi keluarga terhadap keputusan pernikahan dini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan data yang dikumpulkan langsung kepada responden melalui kuesioner. Jumlah responden penelitian adalah 92 orang

dengan data diolah melalui SPSS. Hasil dari penelitian ini merupakan (1) Hasil Uji *Mantel-Haenszel Common Odds Ratio* menunjukkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap keputusan nikah dini di Kecamatan Utan, (2) Hasil Uji *Mantel-Haenszel Common Odds Ratio* menunjukkan bahwa komposisi pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan nikah dini di Kecamatan Utan, (3) Hasil Uji *Mantel-Haenszel Common Odds Ratio* menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap keputusan nikah dini di Kecamatan Utan, (4) Hasil Uji *Mantel-Haenszel Common Odds Ratio* menunjukkan bahwa tingkat kesehatan tidak berpengaruh terhadap keputusan nikah dini di Kecamatan Utan, (5) Hasil Uji *Mantel-Haenszel Common Odds Ratio* menunjukkan bahwa kondisi perumahan tidak berpengaruh terhadap keputusan nikah dini di Kecamatan Utan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Putra (2021) dengan judul “Pernikahan Dini dan Kemiskinan dengan Variabel Putus Sekolah, Perceraian, dan Gender di Indonesia Tahun 2014 (Analisis Data IFLS-5)”, bertujuan untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini, putus sekolah, perceraian, dan gender terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data diambil dari *Indonesia Family Life Survey (IFLS)* tahun 2014. Hasil dari regresi logistik penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel pernikahan dini, putus sekolah, dan gender memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan perceraian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lira *et al.* (2019) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini di Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur”, bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan orangtua, tingkat pendapatan orangtua, serta pengaruh tingkat pendidikan orangtua dan pendapatan orangtua terhadap pernikahan dini di Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda menggunakan *SPSS 16.0*. Penelitian ini menggunakan subjek sebanyak 53 responden pelaku pernikahan dini di desa Mosi Ngaran. Analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, mencari persamaan garis regresi, uji hipotesis menggunakan uji T dan uji F. Hasil penelitiannya adalah: (1) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan tingkat pendidikan orangtua ( $x_1$ ) terhadap pernikahan dini ( $y$ ) yaitu  $0,004 < 0,05$ , (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan tingkat pendapatan orangtua ( $x_2$ ) terhadap pernikahan dini ( $y$ ) yaitu  $0,001 < 0,05$ , (3) terdapat pengaruh secara simultan tingkat pendidikan orangtua ( $x_1$ ) dan tingkat pendapatan orangtua ( $x_2$ ) terhadap pernikahan dini ( $y$ ) yaitu  $0,000 < 0,005$  di Desa Mosi Ngaran Kecamatan Elar Selatan.

Berikut penelitian dari Rahman dan Muh (2019) yang berjudul “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan, dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran di Kota Makassar”, bertujuan untuk mengukur pengaruh dari tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap konsumsi serta kemiskinan yang dilihat dari nilai kepemilikan aset di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dan analisis jalur yang mana jenis penelitiannya

kuantitatif dengan menggunakan data primer dan akan diolah menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pendidikan tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap konsumsi masyarakat migran di Kota Makassar, 2. Pendapatan berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat konsumsi masyarakat migran di Kota Makassar, 3. Pendidikan tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat migran di Kota Makassar, 4. Pendapatan berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat migran di Kota Makassar, 5. Konsumsi tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat migran di Kota Makassar, pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui konsumsi masyarakat migran di Kota Makassar, 7. Pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui konsumsi masyarakat migran di Kota Makassar.